

ABSTRAK

Sanksi pidana bagi korporasi umumnya tidak berupa sanksi tunggal. Selain denda, penyitaan, serta berbagai larangan bagi korporasi merupakan sanksi yang dianggap efektif. Sanksi larangan dalam berbagai bentuknya itu dapat disebut sebagai *corporate imprisonment*. Di samping itu, sanksi tambahan berupa pengumuman keputusan hakim dapat menambah daya memaksa untuk mencegah dilakukannya tindak pidana oleh korporasi, namun dalam prakteknya, seringkali perkara perpajakan tidak melibatkan korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus atau agen sudah dianggap cukup, salah satu contoh dalam perkara perpajakan Nomor : 292/PID.SUS/2019/PN.JKT.BRT dan perkara perpajakan Nomor : 62/PID.SUS/2019/PN.YYK, dimana dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus atau agen sedangkan korporasi tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan bertentangan dengan teori agregasi (*Aggregation Theory*) dimana aktivitas suatu korporasi yang merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa pengurus atau agen sehingga yang bertanggungjawab secara penuh atas aktivitas tersebut adalah tanggungjawab korporasi dan juga terhadap Teori Identifikasi (*Direct Corporate Criminal liability*), menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi. Sesuai dengan tujuan pemidanaan dan teori efek jera, korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas peristiwa pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi bersama dengan pengurus atau agen agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya (*deterrence effect*) dan terhadap korporasi yang diminta pertanggungjawaban pidana selain menerapkan pidana denda, terhadap korporasi tersebut dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pembubaran perusahaan dan diharapkan aparat penegak hukum yang menangani perkara perpajakan membuat suatu terobosan hukum untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak serta membuat memperbaharui UU KUP untuk mengatur secara tegas terhadap subjek hukum dengan membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus dan korporasi.

Kata kunci: tanggungjawab korporasi dalam perkara tindak pidana perpajakan

ABSTRACT

Criminal sanctions for corporations are generally not in the form of a single sanction. In addition to fines, confiscation, as well as various prohibitions for corporations are sanctions that are considered effective. Sanctions of prohibition in its various forms can be referred to as corporate imprisonment. In addition, additional sanctions in the form of announcements of judges' decisions can increase the coercive power to prevent criminal acts from being committed by corporations, but in practice, tax cases often do not involve corporations as legal subjects and criminal liability only to management or agents is considered sufficient. in the tax case Number: 292/PID.SUS/2019/PN.JKT.BRT and the tax case Number: 62/PID.SUS/2019/PN.YYK, where in that case, criminal responsibility is charged to the management or agent while the corporation is not be asked for criminal responsibility, and contrary to the Aggregation Theory where the activities of a corporation which is the output of the joint efforts of some administrators or agencies so that those who are fully responsible for these activities are the responsibility of the corporation and also to the Identification Theory (direct corporate criminal liability). According to this theory, corporation can commit a number of delicts directly through agencies who are closely related to the corporation, acting for and on behalf of the corporation. In accordance with the purpose of punishment and the deterrent effect theory, corporations can be held criminally responsible for tax crimes committed by corporations together with management or agents so that criminals will no longer repeat their crimes (deterrence effect) and against corporations who are asked to be held criminally responsible in addition to applying fines, against the corporation may be subject to additional penalties in the form of revocation of business licenses and dissolution of the company and it is hoped that law enforcement officers who handle tax cases will make a legal breakthrough to optimize criminal liability for corporations and their management in order to increase state revenue from the tax sector and make updates to the KUP Law to regulate firmly against legal subjects by imposing criminal responsibility on management and corporations.

Keywords: *Corporate responsibility in tax crime cases*